

**EFISIENSI PENYEDIAAN BARANG
PUBLIK DI SEMBILAN PEMERINTAH
KOTA JAWA BARAT 2012-2016**



SKRIPSI

**Diajukan untuk
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:
Benedict Patar Jonathan
2013110016**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No.
1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2018**

**EFFICIENCY OF PUBLIC GOODS
PROVISION IN NINE LOCAL
GOVERNMENT WEST JAVA 2012-2016**



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics**

**By
Benedict Patar Jonathan
2013110016**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Accredited by National Accreditation Agency No.
1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2018**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFISIENSI PENYEDIAAN BARANG PUBLIK
DISEMBILAN PEMERINTAH KOTA JAWA BARAT
2012-2016**

Oleh:
Benedict Patar Jonathan
2013110016

Bandung, Juli 2018

Ketua Program Sarjana Ekonomi Pembangunan,



Dr. Miryam B. L. Wijaya

Pembimbing,



Iwantia Savitri Mokoginta, S.E., MBA., M.A., Ph.D.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Benedict Patar Jonathan Napitupulu
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Oktober 1995
NPM : 2013110016
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan
Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

**EFISIENSI PENYEDIAAN BARANG PUBLIK DI SEMBILAN PEMERINTAH
KOTA JAWA BARAT 2012-2016**

Pembimbing : Ivantia Savitri Mokoginta, S.E., MBA., M.A., Ph.D.

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 29 Juli 2018

Pembuat pernyataan: Benedict
patar Jonathan Napitululu



(Benedict Patar Jonathan
Napitupulu)

ABSTRAK

Hipotesis Tiebout menyatakan bahwa penyediaan barang publik akan lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah lokal. Hal ini terjadi karena pemerintah lokal lebih mengetahui informasi tentang preferensi masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Adanya sistem desentralisasi fiskal memberikan kewenangan bagi pemerintah lokal untuk mengelola aspek keuangannya dan menyalurkannya untuk pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur efisiensi penyediaan barang publik di sembilan pemerintah kota di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur skor efisiensi penyediaan barang publik. Hasil penelitian ini menunjukkan Kota Sukabumi, Kota Bandung dan Kota Cirebon merupakan kota yang paling efisien dan menjadi tolok ukur bagi daerah lain. Daerah lain yang belum efisien diharapkan dapat melakukan tindakan untuk kembali efisien. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk kembali efisien dengan mengikuti rekomendasi target perbaikan jumlah input dan output daerah.

Kata Kunci: *Efisiensi penyediaan barang publik, desentralisasi fiskal.*

ABSTRACT

Tiebout hypothesis says that the provision of public goods will be more efficient if provided by the local government. It's because local government know more the information about their society preferences better than central government. Fiscal decentralization authorizes the local government to control its financial aspects and provide public goods according to society preferences. This research aims to analyze and measure the efficiency of public goods provision in nine local governments in West Java. This study uses Data Envelopment Analysis (DEA) to measure the efficiency score provision of public goods. The results of research show that Sukabumi, Bandung and Cirebon is the most efficient city and become a benchmark for other regions. Other areas that are not efficient are expected to take action to be efficient. One other way that can be done to return efficiently by follow target improvement recommendation the number of input and output local.

Keywords: *Efficiency of public goods provision, fiscal decentralization.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi rahmat, kekuatan, kesehatan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efisiensi Penyediaan Barang Publik Di Sembilan Pemerintah Kota Jawa Barat 2012-2016”. Skripsi Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak yang secara tulus dan ikhlas membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama ini diantaranya:

1. Bapak B. Napitupulu dan Alm. R. Nainggolan selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, dan pengorbanan yang tulus kepada penulis. Terima kasih juga kepada Regina Napitupulu dan Abednego Napitupulu selaku kakak dan adik penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Ivantia S. Mokoginta, S.E., MBA., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang selalu sabar, memberikan banyak ilmu, masukan, arahan, waktu, pikiran, tenaga, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Miryam B. L. Wijaya selaku Ketua Ekonomi Pembangunan dan dosen bidang kajian EMK yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Para dosen jurusan Ekonomi Pembangunan lainnya yang telah membagikan ilmunya kepada penulis. Semoga semua ilmu yang sudah penulis peroleh dapat menjadi bermanfaat bagi kehidupan penulis dan bagi seluruh masyarakat dunia.

5. Para murid satu perguruan: Bang Ferdinand, Yosi, Fikri “Aceng”, Albertini “Aten”, Arga, Arda, Igun, Timmy, dan Andre. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, canda, tawa, ilmu dan selalu ada bagi penulis.
6. Kontrakan Yons: Darryl, Dikgem, Icul, dan Jo. Terimakasih banyak atas kebersamaan, persahabatan, canda, tawa, drama, pengalaman, dukungan dan cerita kalian selama ini.
7. Keluarga Ekonomi Pembangunan 2013: Aldwyn, Koji, Deka, Nur, Imun, Rania, Hanan, Jodi, Faisal, Dikcit, Tsana, Feisal, Eno, Gege, Kaka, Mariska, Titto, Mas Agung, Galih, Shafly, Aurel, Dian, Asyifa, Nadia, Giyas, Jon, Rizal dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih banyak atas kebersamaan, persahabatan, canda, tawa, drama, pengalaman, dukungan dan cerita kalian selama ini yang menghiasi hari-hari penulis selama di perkuliahan.
8. Teman-teman di Surabaya (*black united*, DX-RAY) kebersamaan, persahabatan, canda, tawa, motivasi, dan dukungan kalian selama ini yang menghiasi hari-hari penulis selama ini.

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada semua yang telah berjasa. Akhir kata, penulis mohon maaf jika ada kekurangan dalam penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandung, 29 Juli 2018

Benedict Patar Jonathan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	2
1.3. Kerangka Pemikiran	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Desentralisasi Fiskal.....	5
2.2. Barang Publik	8
2.3. Efisiensi Penyediaan Barang Publik	10
2.4. Penelitian Terdahulu.....	16
3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	18
3.1. Metode Penelitian	18
3.2. Objek Penelitian.....	22
4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Hasil Pengolahan Data	33
4.2. Pembahasan.....	35
5. PENUTUP	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	A-1
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	A-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Klasifikasi Barang Publik dan Barang Privat	10
Gambar 2. Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optimal	12
Gambar 3. Penambahan Faktor Produksi dan Implikasi Terhadap Output Produksi	13
Gambar 4. Product Possibility Frontier (PPF)	14
Gambar 5. Perilaku Produsen	15
Gambar 6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) per Pemerintah Kota di Jawa Barat tahun 2012-2016 (dalam Rupiah).....	23
Gambar 7. Dana Perimbangan per Pemerintah Kota di Jawa Barat tahun 2012-2016 (dalam Rupiah)	24
Gambar 8. Lain-Lain Pendapatan per Pemerintah Kota di Jawa Barat tahun 2012-2016 (dalam Rupiah).....	25
Gambar 9. Pembiayaan Daerah per Pemerintah Kota di Jawa Barat tahun 2012-2016 (dalam Rupiah).....	26
Gambar 10. Jumlah Sekolah Negeri per Pemerintah Kota di Jawa Barat tahun 2012-2016.....	27
Gambar 11. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah per Pemerintah Kota di Jawa Barat tahun 2012-2016 (dalam unit).....	28
Gambar 12. Puskesmas per Pemerintah Kota di Jawa Barat tahun 2012-2016 (dalam unit).....	29
Gambar 13. Jumlah Posyandu per Pemerintah Kota di Jawa Barat tahun 2012-2016 (dalam unit).....	30
Gambar 14. Panjang Jalan Kota per Pemerintah Kota di Jawa Barat tahun 2012-2016 (dalam KM)	31
Gambar 15. Terminal Kota per Pemerintah Kota di Jawa Barat tahun 2012-2016 (dalam unit).....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Penerimaan Pemerintah Daerah	6
Tabel 2. Skor Efisiensi Sembilan Pemerintah Kota di Jawa Barat	33
Tabel 3. Sumber Inefisiensi Sembilan Pemerintah Kota di Jawa Barat	34
Tabel 4. Penetapan Target Kota Bogor	35
Tabel 5. Penetapan Target Kota Bekasi	36
Tabel 6. Penetapan Target Kota Depok	36
Tabel 7. Penetapan Target Kota Cimahi	37
Tabel 8. Penetapan Target Kota Tasikmalaya	37
Tabel 9. Penetapan Target Kota Banjar	37

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu fungsi pemerintah yaitu menyediakan barang publik yang merupakan komoditas atau jasa yang disediakan untuk semua masyarakat. Barang publik disediakan oleh pemerintah dengan alasan bahwa penyediaan barang publik oleh pihak swasta akan menyebabkan *under production* (Andreoni, 1995 dalam Spackman 2002). Pemerintah juga mempunyai peran aktif dan tanggung jawab dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan yang dicapai melalui aktivitas pemerintah dalam perekonomian khususnya berkaitan dengan penyediaan barang publik.

Dalam dua dekade terakhir Indonesia mengalami pergeseran paradigma pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, wewenang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, dalam hal ini daerah-daerah kabupaten atau kota tinggal melaksanakannya saja. Sentralisasi memiliki kelemahan yaitu kebijakan dan keputusan-keputusan untuk daerah berada di pusat, sehingga butuh waktu yang lama untuk merealisasikannya dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan sistem pemerintah yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi juga membuat pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyediakan barang publik. Hal ini sesuai dengan UU nomor 25 tahun 1999 dimana sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola bidang ekonomi dan daerahnya secara mandiri.

Desentralisasi fiskal pada dasarnya adalah penyerahan segala urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah atau lokal untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui alokasi penyediaan barang dan jasa publik yang lebih efisien karena kebijakan ini memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya sendiri dan mengalokasikannya sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakatnya. Rochana (2009) menyatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya

diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, dengan alasan:

- Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya.
- Pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
- Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk melakukan inovasi.

Dengan pemberian dana perimbangan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas belanja lebih dari sebelum ada dana perimbangan. Semakin tinggi kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mengelola wilayahnya, maka diharapkan akan semakin tinggi pula perkembangan ekonomi wilayahnya. Selain itu kapasitas daerah yang semakin tinggi tersebut akan mendorong terciptanya penyediaan pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien (Robalino, Picazo, & Voetberg, 2001).

Dengan penerimaan daerah yang terbatas dan tuntutan kebutuhan barang publik yang semakin banyak pemerintah harus efisien dalam menggunakan dana yang ada. Efisiensi penyediaan barang publik yang tercipta akan menghemat belanja pemerintah daerah. Maksud dari efisiensi penyediaan barang publik tersebut menurut Antony et al. (2004) dalam Rochana (2009) adalah bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini adalah keuangan daerah secara akurat dan optimal, untuk kemudian menghasilkan sejumlah output atau layanan publik terbaik kepada masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Salah satu tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan sistem desentralisasi pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyediakan barang publik. Dengan sistem desentralisasi, efisiensi dalam penyediaan barang publik dapat terjadi karena pemerintah daerah sebagai penyedia barang publik memiliki pemahaman mengenai kebutuhan barang publik dibandingkan dengan pemerintah pusat. Dengan barang publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pemerintah dapat lebih efisien dalam penggunaan dana yang ada.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur efisiensi penyediaan barang publik di sembilan pemerintah kota di Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota

Tasikmalaya. Untuk mengukur tingkat efisiensi penyediaan barang publik, peneliti menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) Barang publik yang dimaksud terdiri dari sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Informasi mengenai efisiensi dalam penyediaan barang publik perlu diketahui agar masing-masing daerah dapat mengevaluasi hasil keputusan yang telah ditetapkan guna menghemat pengeluaran belanja daerah mengingat sumberdaya daerah yang ada jumlahnya terbatas namun kebutuhan akan penyediaan barang publik tidak terbatas.

1.3. Kerangka Pemikiran

Desentralisasi Fiskal dibahas dalam teori federalisme fiskal yang termasuk dalam teori ekonomi sektor publik. Elemen penting dari ekonomi sektor publik adalah peran pemerintah dalam ekonomi. Ketika mekanisme pasar gagal karena karakteristik barang publik, pemerintah harus intervensi dengan menerapkan kebijakan untuk mengoreksi kegagalan pasar. Asumsi dari teori ekonomi sektor publik adalah pemerintah berlaku sebagai *custodian of public interest* yaitu memaksimalkan kesejahteraan sosial. Teori federalisme fiskal menyatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab untuk stabilisasi ekonomi makro dan redistribusi pendapatan dalam bentuk bantuan bagi kelompok miskin. Selain itu peran pemerintah pusat adalah menyediakan barang publik nasional (*national public goods*) seperti jasa pertahanan, bagi seluruh warga negara. Sementara, peran pemerintah daerah adalah menyediakan barang publik lokal (*local public goods*) pada tingkat yang efisien. Menurut Oates (2005) dengan penyediaan barang publik pada tingkat yang sesuai dengan permintaan masyarakat di setiap daerah, maka akan dihasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi daripada penyediaan barang publik yang seragam pada tingkat penyediaan yang sama oleh pemerintah pusat.

Hipotesis Tiebout (1956) juga menyatakan bahwa inefisiensi penyediaan barang publik atau penyediaan barang publik yang tidak optimal dapat diselesaikan apabila sistem pemerintahan terdesentralisasi. Desentralisasi dapat mendorong efisiensi penyediaan barang publik. Hal ini terjadi karena desentralisasi memberikan pilihan pada masyarakat untuk tinggal pada wilayah di mana penyediaan barang publik dan sistem pajak yang sesuai dengan preferensi mereka.

Desentralisasi fiskal juga diterapkan di berbagai negara dan memiliki efek yang berbeda. Hasil penelitian Jalil (2010) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan negatif dengan efisiensi fiskal. Hasil penelitian Balaguer-Coll et al. (2010) menunjukkan pemerintah daerah di Spanyol memperoleh manfaat dari

desentralisasi fiskal. Jadi penelitian ini untuk mengetahui manfaat desentralisasi fiskal di sembilan pemerintah kota di Jawa Barat. Manfaat tersebut diketahui dengan cara mengukur tingkat efisiensi penyediaan barang publik di sembilan pemerintah kota di Jawa Barat. Penelitian yang mengukur efisiensi penyediaan barang publik khususnya di sembilan pemerintah kota di Jawa Barat masih belum ada. Jadi originalitas dari penelitian ini yang pertama objek penelitian yang digunakan yaitu sembilan pemerintah kota di Jawa Barat dan data panel 2012-2016 dan variabel input dan output penyediaan barang publik.